

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana gempa bumi disusul dengan gelombang tsunami yang melanda sebagian wilayah di Asia pada akhir tahun 2004, telah mengakibatkan kerugian yang tidak terduga terutama di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Catatan Satkorlak yang dikutip oleh Nazamuddin (2005) menyebutkan sebanyak 236.116 jiwa telah menjadi korban dari bencana alam tersebut dan sekitar 77 persen dari jumlah yang menjadi korban merupakan penduduk Aceh. Sedangkan menurut tim penyusun *'Blue Print Pembangunan Aceh'* dari Universitas Syahkuala (2005) melansir bahwa korban tewas di Aceh jumlahnya sekitar 166.320 orang dan lebih dari 6.245 orang dinyatakan hilang serta sekitar 100.000 orang luka-luka. Bencana tersebut juga mengakibatkan sekitar 617.000 orang kehilangan rumah dan terpaksa hidup di pengungsian (penampungan) sementara. Tidak hanya korban jiwa, kerugian material yang diakibatkan oleh bencana itu juga terbilang besar jumlahnya. Menurut pemerintah paling tidak dibutuhkan dana segar sebanyak 35 triliun rupiah untuk membangun kembali daerah yang terkena dampak bencana (Kompas, 3 Maret 2005).

Perkiraan jumlah yang demikian tentunya amat kasar bila dibandingkan dengan jumlah kerugian sebenarnya. Namun demikian, jumlah itu tentunya sudah menunjukkan bahwa dampak yang dimunculkan oleh bencana alam tersebut

sangatlah dasyat dan itu tidak termasuk korban jiwa yang tidak bisa dinilai dengan materi.

Berkenaan dengan upaya mengatasi dampak yang muncul, oleh pemerintah ditetapkan tiga tahapan kebijakan berkenaan dengan waktu penanganan korban bencana alam masa tanggap darurat, masa rehabilitasi dan masa rekonstruksi fisik. Tahapan yang berkaitan dengan penanganan masa tanggap darurat telah berlalu. Tahapan selanjutnya akan diupayakan oleh pemerintah adalah tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi kehidupan. Salah satu bagian terpenting dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi adalah usaha mengembalikan keadaan ekonomi masyarakat korban kepada keadaan sebelum terjadinya musibah gempa bumi dan gelombang tsunami.

Dalam rangka pemulihan kembali kondisi sosial, ekonomi dan budaya Aceh yang dilanda gempa dan tsunami, pemerintah Republik Indonesia tanggal 16 April 2005, berdasarkan mandat yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Presiden telah membentuk suatu badan yaitu Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) yang ditugaskan untuk memulihkan keadaan dan memperkuat masyarakat di Aceh dan Nias dengan merancang dan mengawasi program rekonstruksi dan pembangunan yang terkoordinasi dan bertumpu pada masyarakat lokal dengan standar profesionalisme tertinggi.

Lambatnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi sudah merupakan rahasia umum dengan dalih berbagai macam kendala yang dihadapi di lapangan, hal yang mengejutkan adalah terdapatnya 3.698 KK pada periode 31 Desember 2007

masih terdapat para pengungsi yang tinggal di barak (Laporan BRR Tahun 2007). Hal ini tentunya sangat kontras bila dibandingkan dengan arus bantuan yang mengalir ke Aceh yang seharusnya mempercepat proses pembangunan kembali Aceh. Mengapa hal tersebut terjadi?. Pada hal masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang memiliki sejarah gemilang, terutama dalam hal partisipasi masyarakat dalam pembangunan, hal ini terbukti pada awal kemerdekaan Indonesia, sumbangan Aceh yang mencapai 120.000 dollar US dan 20 kilogram emas cukup untuk membeli dua pesawat terbang jenis Dakota yang monumen "Seulawah RI-001" di Blang Padang dan "Seulawah RI-002" di Jakarta menandai sumbangan Aceh sebagai daerah modal untuk Indonesia. Selain itu, juga tampak pada proses pembuatan irigasi di Pidie sepanjang 17 kilometer yang dikerjakan secara gotong-royong oleh masyarakat Aceh yang dipimpin langsung oleh tokoh Daud Beureueh pada tahun 1963 (Ibrahimy 1982 : 113)

Sejalan dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan dalam rangka memulihkan kembali kehidupan sosial, ekonomi dan budaya juga berkaitan dengan upaya pengurangan jumlah masyarakat miskin di Aceh. Fenomena kemiskinan di Aceh merupakan sesuatu yang harus segera diselesaikan, Angka Kemiskinan di Aceh meningkat sebagai akibatnya dari tsunami yaitu dari 28,4 persen pada tahun 2004 menjadi 32,6 persen pada tahun 2005 (Prasodjo 2005 dan *Aceh Poverty Assessment* 2008).

Fenomena kemiskinan tersebut juga terdapat pada masyarakat desa nelayan termasuk di Desa Lhok Pu'uk setelah berbagai program/proyek reduksi kemiskinan diimplementasikan, setelah sejumlah dana, material dan teknologi

dialokasikan, menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam formulasi dan implementasi program atau proyek reduksi kemiskinan tersebut. Karena itu, diperlukan asumsi dasar baru tentang fenomena kemiskinan pada tingkat rumah tangga itu sendiri dalam kerangka konseptual baru tentang upaya reduksi kemiskinan pada tingkat individu (aktor) dan lembaga yang terlibat dalam upaya reduksi tersebut.

Pemanfaatan dan pengembangan modal sosial (*sosial capital*) yang ada dalam masyarakat merupakan salah satu alternatif dalam upaya reduksi kemiskinan masyarakat. Yang terjadi selama ini, potensi modal sosial yang ada dalam masyarakat tidak pernah digali dan dikembangkan, bahkan cenderung diabaikan dengan kebijakan pembangunan yang *top down*. Mengidentifikasi dan mengembangkan model transmisi modal sosial yang ada dalam masyarakat nelayan, dengan demikian merupakan salah satu cara yang dapat mereduksi kemiskinan nelayan.

Indonesia yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan memiliki potensi kelautan cukup besar, seharusnya mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan yang menggantungkan hidupnya pada potensi kelautan (maritim) tersebut. Kenyataannya, kehidupan masyarakat nelayan senantiasa dilanda kemiskinan, bahkan kehidupan nelayan sering diidentikkan dengan “kemiskinan”. Ada apa sebenarnya yang terjadi dengan kehidupan masyarakat nelayan yang senantiasa dibelenggu oleh kemiskinan tersebut.

Beberapa perspektif (antara lain perspektif struktural dan perspektif kultural) telah digunakan sebagai pendekatan untuk memahami realitas

kemiskinan nelayan. Beberapa program dan proyek telah pula diimplementasikan oleh berbagai pihak (pemerintah dan non pemerintah) dalam upaya reduksi kemiskinan nelayan. Fakta memperlihatkan bahwa reduksi kemiskinan nelayan tidak terjadi, bahkan yang terjadi adalah kemiskinan nelayan yang semakin parah dan semakin terpolarisasinya komunitas masyarakat yang memiliki modal dengan nelayan miskin yang rawan dengan potensi konflik. Dari fenomena kemiskinan masyarakat nelayan yang juga merupakan korban gempa dan tsunami serta lambatnya proses rekontruksi dan rehabilitasi Aceh tersebut diatas, penulis bermaksud untuk melihat potensi modal sosial yang terdapat pada masyarakat korban gempa dan tsunami.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas dapat diidentifikasi berbagai gejala yang terdapat di Desa Lhok Pu'uk sebagai berikut :

1. Masyarakat Desa Lhok Pu'uk merupakan korban gempa dan gelombang tsunami
2. Terdapat gejala bantuan kemanusiaan dalam rangka rekontruksi dan rehabilitasi dari berbagai pihak tidak dapat dimanfaatkan untuk proses rekontruksi dan rehabilitasi serta pengentasan kemiskinan di Desa Lhok Pu'uk.
3. Terdapat gejala kemiskinan baik struktural maupun kemiskinan kultural pada masyarakat nelayan Desa Lhok Pu'uk.

4. Terdapat gejala modal sosial yang ada pada masyarakat Desa Lhok Pu'uk tidak digunakan dalam rangka proses rekontruksi dan rehabilitasi serta reduksi kemiskinan pada masyarakat.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan gambaran tersebut di atas maka dirasa perlu untuk menemukan suatu perspektif baru yang mampu mereduksi kemiskinan nelayan yang juga korban gempa dan tsunami dengan cara penguatan pada basis individu (aktor) dan kelembagaan komunitas melalui pemanfaatan modal sosial yang ada dalam masyarakat nelayan korban gempa dan tsunami. Oleh karena itu, rencana penelitian ini diajukan terutama untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi modal sosial pada masyarakat nelayan di desa Lhok Pu'uk ketika proses rehabilitasi dan rekontruksi berjalan ?
2. Bagaimana proses revitalisasi modal sosial dalam upaya mereduksi kemiskinan pada masyarakat nelayan korban gempa dan gelombang tsunami?
3. Bagaimanakah model sinergi modal sosial dan program-program bantuan dalam proses rehabilitasi dan rekontruksi dapat mereduksi kemiskinan pada masyarakat nelayan korban gempa dan gelombang tsunami?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagaimana yang disebut dibawah ini, yaitu :

1. Untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai kondisi modal sosial modal pada masyarakat nelayan di desa Lhok Pu'uk ketika proses rehabilitasi dan rekontruksi berjalan.
2. Untuk mengetahui potensi modal sosial yang direvitalisasi dalam upaya mereduksi kemiskinan pada masyarakat nelayan korban gempa dan gelombang tsunami di Desa Lhok Pu'uk Kecamatan Seunedon Kabupaten Aceh Utara.
3. Untuk mendiskripsikan model sinergi modal sosial dan program-program bantuan dapat mereduksi kemiskinan pada masyarakat nelayan korban gempa dan gelombang tsunami di Desa Lhok Pu'uk Kecamatan Seunedon Kabupaten Aceh Utara.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis adalah :

1. Kegunaan Teoritis.

Penelitian ini berguna untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang pemanfaatan modal sosial dalam usaha mereduksi kemiskinan pada masyarakat nelayan korban gempa dan gelombang stunami.

2. Kegunaan Praktis.

Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan, baik pemerintah maupun swasta dan aktifis LSM untuk menggunakan modal sosial dalam rangka mereduksi kemiskinan pada masyarakat nelayan umumnya dan korban bencana khususnya.

F. Kajian Pustaka

1. Kerangka Teoritis

Secara sederhana istilah modal sosial dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengkonsepsikan sumber daya yang tidak kasat mata, nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut masyarakat yang didalamnya manusia dapat ambil bagian dalam kehidupan sehari-hari.

Konsep modal sosial yang dijadikan fokus dalam penelitian ini pertama kali dikemukakan oleh Coleman (1988) yang mendefinisikan modal sosial sebagai aspek-aspek dari struktur hubungan-hubungan antar individu yang memungkinkan mereka menciptakan nilai-nilai baru. Konsep ini menjadi populer setelah beberapa sarjana menggunakan konsep modal sosial ini dalam kajian mereka, seperti: Ostrom (1992); Putnam (1993), Fukuyama (1995), dan Rose (1998). *The World Bank* sebagai salah satu institusi finansial dunia yang banyak menyalurkan bantuan, khususnya bagi negara-negara dunia ketiga, juga tertarik dengan hasil kajian yang menggunakan konsep modal sosial tersebut (Dasgupta dan Serageldin, 1999).

Dari hasil kajian yang dilakukan terhadap berbagai proyek pembangunan di dunia ketiga, Ostrom (1992) sampai pada suatu kesimpulan bahwa modal sosial merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu proyek pembangunan; Putnam (1993) yang mengkaji tentang kehidupan politik di Italia menemukan bahwa modal sosial merupakan unsur utama pembangunan sebuah masyarakat madani. Lebih jauh Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai suatu nilai *mutual trust* (kepercayaan) antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya.

Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Hal ini juga mengandung pengertian bahwa diperlukan adanya suatu *social networks (networks of civic engagement)* yaitu ikatan atau jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dan norma yang mendorong produktivitas komunitas. Bahkan lebih jauh, Putnam melonggarkan pemaknaan asosiasi horisontal, tidak hanya yang memberi *desireable outcome* (hasil pendapatan yang diharapkan) melainkan juga *undesirable outcome* (hasil tambahan yang tidak diinginkan).

Lebih jauh lagi Bourdieu (1970) mendefinisikan modal sosial sebagai “sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik (atau dengan kata lain keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk

dukungan kolektif". Dalam pengertian ini modal sosial menekankan pentingnya transformasi dari hubungan sosial yang sesaat dan rapuh, seperti pertetanggaan, pertemanan, atau kekeluargaan, menjadi hubungan yang bersifat jangka panjang yang diwarnai oleh perasaan kewajiban terhadap orang lain. Bourdieu juga menegaskan tentang modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk *social capital* (modal sosial) berupa institusi lokal maupun kekayaan sumber daya alamnya. Pendapatnya menegaskan tentang modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang didalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial (*social entity*) tertentu (paguyuban, kelompok arisan, maupun asosiasi tertentu).

Fukuyama (1995) yang mengkaji bidang ekonomi menyebutkan bahwa modal sosial yang berintikan kepercayaan (*trust*) merupakan dimensi budaya dari kehidupan ekonomi (*cultural dimension of economic life*) yang sangat menentukan dalam keberhasilan pembangunan ekonomi. Fukuyama mendefinisikan modal sosial sebagai serangkaian nilai atau norma informal pemberi teladan yang digunakan bersama diantara anggota-anggota sebuah kelompok yang memungkinkan mereka bekerja sama. Sementara itu, Rose (1999) dalam penelitiannya di Russia menemukan bahwa modal sosial merupakan unsur utama bagi bekerjanya organisasi informal dalam masyarakat sebagai alternatif dari organisasi formal.

Modal sosial dipahami sebagai bentuk institusi-institusi, relasi-relasi dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas dan interaksi sosial dalam

masyarakat. Semua itu menciptakan suatu kohesi sosial (*social cohesion*) yang amat menentukan bagi kelangsungan perkembangan ekonomi dan pembangunan suatu masyarakat. Pengertian ini menekankan pada koherensi internal suatu masyarakat yang merupakan potensi dan modal sosial. Dengan demikian modal sosial merujuk pada seperangkat norma, jaringan dan organisasi yang melaluinya orang memperoleh akses pada kekuasaan (*power*) dan sumber daya yang merupakan sarana yang memungkinkan pengambilan keputusan dan formulasi kebijakan. Pengertian modal sosial menekankan pada adanya relasi sosial antaranggota masyarakat yang dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada pada masyarakat tersebut.

Ostrom (1999) membandingkan modal sosial dan modal fisik dan menyatakan bahwa modal sosial sulit dilihat dan diukur, sulit untuk dikonstruksi oleh intervensi pihak luar, namun institusi pemerintah memberi pengaruh yang kuat kepada adanya modal sosial. Modal sosial dapat dibuktikan dengan adanya komitmen dan upaya mempertahankan resiprositas dan kepercayaan (*reciprocity and trust*). Adanya modal sosial dalam mencapai tujuan menghasilkan pemahaman yang saling menguntungkan dan upaya-upaya untuk bekerja sama dengan biaya yang rendah.

Pada pembahasan teori-teori sosial, modal sosial dapat disetarakan dengan modal finansial, modal fisik, dan modal manusia (Coleman, 2000). Definisi modal sosial yang dikemukakan oleh Coleman memiliki cakupan yang luas, termasuk asosiasi vertikal yang dicitrakan oleh adanya hirarki dan distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara para pelakunya. Hal itu dapat mengakibatkan manfaat yang

hanya dapat dinikmati oleh sebagian orang dan sebagian orang lagi dirugikan, tergantung pada karakteristik dan penerapannya. Modal sosial terdiri atas beberapa aspek struktur sosial dan memfasilitasi tindakan-tindakan individu atau kelompok sehingga memungkinkan tercapainya tujuan.

Menurut pakar seperti, Serageldin dan Grootaert (2000) menegaskan adanya tiga tingkatan modal sosial itu, yakni:

1. Semua hubungan kerja sama informal dan asosiasi horizontal tingkat lokal yang berdampak pada produktivitas komunitas. Asosiasi-asosiasi ini mencakup berbagai jaringan kerja sama anggota masyarakat dan norma-norma sosial.
2. Asosiasi-asosiasi bersifat hirarki, mencakup berbagai entitas berlainan, terdiri atas beberapa aspek struktur sosial, dan mereka memfasilitasi tindakantindakan tertentu para aktor didalam struktur tadi. Formulasi ini memperluas konsep modal sosial sehingga selain mencakup asosiasi-asosiasi informal horizontal dan lokal-horizontal pada level pertama, juga asosiasi-asosiasi yang bersifat hirarkis, vertikal dan supra lokal.
3. Pandangan atas modal sosial yang lebih luas lagi dan mencakup lingkungan sosial dan politik yang memungkinkan norma-norma berkembang dan membentuk struktur sosial. Hal itu mencakup berbagai hubungan dan struktur institusional yang terformalkan, seperti pemerintahan, rezim politik, aturan hukum, sistem peradilan serta kebebasan sipil dan politik.

Ketiga tingkatan modal sosial yang disebutkan diatas memiliki karakteristik yang sama, yaitu:

1. Berkaitan dengan wilayah ekonomi, sosial dan politik serta memiliki kepercayaan bahwa relasi sosial mempengaruhi dan dipengaruhi produk-produk ekonomis.
2. Memfokuskan pada relasi antara agen-agen ekonomi dan cara-cara di mana organisasi formal dan informal dan agen-agen tersebut dapat meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi.
3. Mengimplikasikan bahwa relasi-relasi dan institusi-institusi sosial memiliki pengaruh eksternal yang bersifat positif.

Menurut Uphoff (1999), modal sosial merupakan akumulasi berbagai tipe sosial, psikologi, kognitif, institusional, dan aset-aset yang saling berhubungan dalam meningkatkan manfaat kerja sama dan produktivitas pihak-pihak yang terlibat. Modal sosial dipahami sebagai kombinasi dan aturan-aturan dasar (struktural) dan kognitif. Selanjutnya, menurut Agusyanto (1997), untuk memahami pengertian jaringan, perlu ditelaah komponen-komponen yang membentuk suatu jaringan dan prinsip-prinsip yang mendasar agar “sesuatu” bisa dikategorikan sebagai sebuah “jaringan.” Komponen-komponen sebuah “jaringan” adalah:

1. Sekumpulan orang, obyek atau kejadian, minimal berjumlah tiga satuan, yang berperan sebagai terminal (pemberhentian). Biasariya direpresentasikan dengan titik-titik, yang dalam peristilahan jaringan di

sebut sebagai aktor atau node. Misalnya: jaringan perdagangan terdiri atas kumpulan para pedagang.

2. Seperangkat 'ikatan' yang menghubungkan satu titik ke titik lainnya dalam jaringan. Ikatan ini biasanya direpresentasikan dengan 'garis' yang merupakan suatu saluran atau jalur, misalnya: hubungan perdagangan.
3. Arus, yang dalam diagram digambarkan dengan 'anak panah.' Ada sesuatu yang 'mengalir' dan satu titik ke titik-titik lainnya melalui saluran atau jalur yang menghubungkan masing-masing titik di dalam jaringan. Tanpa ada sesuatu yang 'mengalir,' sejumlah titik-titik tersebut hanya merupakan rangkaian titik-titik, bukan sebuah jaringan. Misalnya: dalam jaringan perdagangan, yang mengalir adalah barang-barang yang diperdagangkan.

Selanjutnya, suatu jaringan didasari oleh prinsip-prinsip tertentu yang kerap kali mendasarinya, yaitu sebagai berikut:

1. Ada pola tertentu. Sesuatu yang mengalir dan titik yang satu ke titik-titik lainnya, saluran atau jalur yang harus dilewati tidak terjadi secara acak, tetapi dengan menggunakan saluran tertentu.
2. Adanya rangkaian 'ikatan-ikatan' itu menyebabkan sekumpulan titik-titik yang ada bisa dikategorikan atau digolongkan sebagai 'satu kesatuan' yang berbeda dengan 'kesatuan-kesatuan' yang lain.

Misalnya: apabila seorang pedagang bukan merupakan satu mata rantai

dengan para pedagang jaringan X, maka dia tidak dapat digolongkan sebagai anggota jaringan perdagangan X.

3. Ikatan-ikatan yang menghubungkan satu titik ke titik-titik lainnya harus bersifat relatif permanen (ada unsur waktu, yaitu masalah “durasi”).
4. Ada ‘hukum’ yang mengatur saling keterhubungan masing-masing titik di dalam jaringan-ada hak dan kewajiban yang mengatur masing-masing anggota jaringan. Hukum atau aturan-aturan inilah yang melingkupi bahwa sekumpulan titik (aktor) tersebut bisa digolongkan sebagai satu kesatuan yang spesifik, yang berbeda dengan kesatuan-kesatuan lainnya.
5. Adanya motif yang melatarbelakangi tindakan dan rasa saling percaya (*trust*) yang mendasari hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan.

Jaringan sosial (*social net*) adalah suatu jaringan tipe khusus, di mana ikatan yang menghubungkan satu titik ke titik lain dalam jaringan adalah hubungan sosial. Dengan demikian, secara langsung atau tidak langsung yang menjadi anggota suatu jaringan sosial adalah manusia. Dalam hal ini mungkin saja yang menjadi anggota suatu jaringan adalah sekumpulan orang yang mewakili titik-titik seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, jadi tidak harus satu titik diwakili oleh satu orang, tetapi dapat berbentuk organisasi, instansi, pemerintah atau negara.

Hubungan sosial (*social relation*) antara dua orang mencerminkan adanya pengharapan peran dan masing-masing lawan interaksinya. Tingkah laku yang diwujudkan dalam suatu interaksi sosial itu sistematis, meskipun para pelakunya belum tentu menyadarinya. Ada pengulangan tingkah laku untuk hal-hal yang sama dan dalam situasi yang sama. Hal itu menandakan adanya suatu keteraturan dan adanya 'sesuatu' yang membuat tingkah laku yang diwujudkan menjadi 'teratur.' Jadi, ada hak dan kewajiban yang mengatur saling keterhubungan di antara para anggota jaringan sosial.

Pengelompokan yang menggambarkan adanya jaringan kerja sama tidak harus dibayangkan sebagai berkumpulnya sejumlah orang disuatu tempat tertentu, tetapi lebih menekankan pada unsur kontinuitas hubungan atau kontak antara warga desa dengan lembaga-lembaga atau figur tertentu (elit) yang terdapat di desa itu atas dasar "kepentingan" tertentu. Bahwa setiap orang mengadakan kontak atau hubungan dengan sesamanya adalah sebuah keniscayaan, dan kemudian atas dasar kesamaan "kepentingan" tertentu, masing-masing individu secara sadar atau tidak akan mengidentifikasikan diri dengan kelompok sosial tertentu, yang selanjutnya akan sangat mempengaruhi bentuk, jenis, sifat, dan kelangsungan hubungan/kontak itu, walaupun pada kenyataannya setiap individu tidak selalu mencirikan dirinya kepada satu jenis kelompok sosial saja. Hal itu sangat tergantung kepada faktor lingkungan dan kepentingan. Namun, umumnya masyarakat dapat dengan mudah mengelompokkan seseorang dengan satu atau lebih ciri pengelompokan sosial yang menonjol pada seseorang. Dalam masyarakat desa, keberadaan kelompok-kelompok sosial beserta lembaga yang

mewadahnya relatif mudah ditemukan sekaligus dengan jaringan-jaringan sosialnya bila kita mengamati berbagai aktivitas mereka sehari-hari.

Jaringan sosial komunitas dapat diperkuat melalui akumulasi modal sosial horizontal (pemeliharaan kepercayaan dan ikatan warga di dalam komunitas dan dengan kelompok lain dalam komunitas) dan modal sosial vertikal (relasi antara negara, pasar dan masyarakat yang lebih luas) serta bagaimana modal sosial dapat berperan dalam rangka penyelesaian fragmentasi dan konflik sosial (Colletta, 2000).

Upaya untuk melakukan kategorisasi dan analisis modal sosial sulit dilakukan karena banyak definisi konsep dan cakupannya. Secara umum, modal sosial mengacu pada sistem yang mempengaruhi atau sebagai dampak dan organisasi sosial dan ekonomi, seperti pandangan dunia, kepercayaan, resiprositas, pertukaran informasi dan ekonomi, dan kelompok, serta asosiasi formal dan informal. Woolcock's dalam Colletta (2000) menyatakan empat dimensi modal sosial, yaitu:

1. Ikatan yang kuat (*integration*), terutama terdapat dalam hubungan keluarga dan tinggal dekat (tetangga). Relasi-relasi yang terbentuk terutama didasari kekerabatan, etnis, dan agama. Ikatan ini memiliki mekanisme pertahanan yang kuat sehingga dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar untuk mempertahankan komunitasnya.
2. Ikatan yang lemah (*linkages*), terjadi dalam interaksi antara anggota komunitas dengan luar komunitas dan antarkomunitas. Relasi-relasi dalam dimensi ini dapat terjadi secara lintas kekerabatan, etnis, dan

agama. Hal ini seringkali terjadi karena adanya perkembangan ikatan-ikatan antarwarga masyarakat dan kemajuan ekonomi sehingga dapat membantu masyarakat memiliki keuntungan strategis yang dibutuhkan untuk bergerak maju.

3. Institusi formal (*organizational integrity*). Dimensi ini meliputi lembaga-lembaga negara dan efektivitasnya dalam berperan sesuai dengan kondisi dan norma-norma sosial yang ada. Dimensi ini juga meliputi mekanisme potensial yang berpengaruh sebagai kontrol sosial seperti media massa. Tingkat integritas negara dapat berpengaruh terhadap peran masyarakat sebagai pelengkap atau pengganti fungsi dan peran negara.
4. Interaksi antara negara dan masyarakat (*sinergy*) yang merefleksikan bagaimana pemimpin dan lembaga-lembaga pemerintah berinteraksi dengan komunitas. Penetrasi pemerintah yang otoriter ke dalam masyarakat akan memberikan ruang yang terbatas bagi perkembangan ikatan dan jaringan dalam masyarakat.

Ciri-ciri organisasi sosial yang terdapat pada pengertian modal sosial menurut Putnam meliputi jaringan, norma-norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk hasil yang saling menguntungkan. Pembangunan ekonomi yang positif dan pemerintahan yang efektif akan terjadi jika didukung oleh ikatan-ikatan warga masyarakat seperti solidaritas, integritas, dan partisipasi. Ikatan-ikatan ini membantu perkembangan norma-norma resiprositas yang mendorong sentimen kepercayaan dalam masyarakat dan

meningkatkan efektivitas komunikasi dan organisasi sosial. Perkembangan komunikasi dan arus informasi mendukung efisiensi institusi. Dengan demikian, modal sosial merupakan sumber daya yang cenderung akan terus berkembang jika dioptimalkan pemanfaatannya dan berkurang manfaatnya jika tidak digunakan, berbeda dengan modal fisik yang akan mengalami penyusutan jika terus digunakan. Modal sosial merupakan milik umum, bukan milik pribadi-pribadi. Berdasarkan model Woolcock, hal ini terfokus pada integrasi dan ikatan (Colletta, 2000).

Dalam mempelajari gejala pertukaran atau resiprositas, ilmu ekonomi mempunyai cara tersendiri jika dibandingkan dengan antropologi ekonomi. Ilmu ekonomi hanya berurusan dengan pertukaran yang menggunakan mekanisme uang. Sedangkan antropologi ekonomi pada masa awal perkembangannya lebih banyak berurusan dengan gejala pertukaran tradisional yang tidak menggunakan mekanisme uang. Dewasa ini banyak ahli antropologi ekonomi yang menaruh perhatian terhadap gejala pertukaran yang menggunakan uang. Perhatian seperti ini dirasa perlu sejalan dengan kenyataan bahwa transformasi ekonomi tradisional menuju sistem ekonomi modern sedang melanda di berbagai tempat, sejak berkembangnya penjajahan sampai pada masa globalisasi sekarang ini.

Resiprositas yang menjadi ciri pertukaran dalam perekonomian tradisional sedang berubah dan berhadapan dengan sistem pertukaran komersial (Sairin, 2002). Pertukaran merupakan konsep yang berhubungan dengan sosok-sosok tentang perubahan barang atau jasa tertentu dan individu-individu atau kelompok-kelompok, dan perubahan ini dilakukan dengan cara memindahkan

barang atau jasa kepada individu-individu atau kelompok-kelompok lain guna mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Secara sederhana resiprositas adalah pertukaran timbal balik antarindividu atau antarkelompok. Resiprositas merupakan pola pertukaran sosial-ekonomi. Dalam pertukaran tersebut, individu memberikan dan menerima pemberian barang atau jasa karena kewajiban sosial. Terdapat kewajiban orang untuk memberi, menerima, dan mengembalikan kembali pemberian dalam bentuk yang sama atau berbeda. Dengan melakukan resiprositas orang tidak hanya mendapatkan barang tetapi dapat memenuhi kebutuhan sosial yaitu penghargaan baik ketika berperan sebagai pemberi atau penerima.

Resiprositas ini menjadi ciri sistem ekonomi masyarakat sederhana dan petani tradisional. Resiprositas cenderung tidak akan berlangsung tanpa adanya hubungan simetris antarkelompok atau antarindividu. Hubungan simetris ini adalah hubungan sosial, dengan masing-masing pihak menempatkan diri dalam kedudukan dan peranan yang sama ketika proses pertukaran berlangsung. Konsep resiprositas berbeda dengan konsep redistribusi karena adanya hubungan simetris sebagai syarat timbulnya aktivitas resiprositas, sedangkan aktivitas redistribusi memerlukan syarat adanya hubungan asimetris. Hubungan asimetris ditandai oleh adanya individu-individu tertentu yang tampil sebagai pengorganisasian pengumpulan barang atau jasa dan anggota-anggota kelompok.

Karakteristik lain yang menjadi syarat sekelompok individu atau beberapa kelompok dapat melakukan aktivitas resiprositas adalah adanya hubungan secara individu di antara mereka. Pola hubungan ini terutama terjadi di dalam komunitas

kecil di mana anggota-anggotanya menempati lapangan hidup yang sama dan di dalamnya kontrol sosial sangat kuat dan hubungan sosial yang intensif mendorong orang untuk berbuat mematuhi adat kebiasaan.

Proses pertukaran resiprositas lebih panjang daripada jual-beli. Proses jual-beli biasanya terjadi dalam waktu yang sangat pendek, misalnya jual-beli barang di pasar. Proses resiprositas ada yang relatif pendek namun ada juga yang panjang. Dikatakan pendek, kalau proses tukar-menukar barang atau jasa dilakukan dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun, misalnya tolong-menolong antarpetani dalam mengerjakan tanah. Tolong menolong ini dapat berlangsung hanya dalam satu musim tanam, dan kalau kedua belah pihak telah memberikan bantuan dan menerima kembali bantuan yang diberikan, maka proses resiprositas tersebut dapat dikatakan telah berakhir. Proses resiprositas dapat berlangsung sepanjang hidup seorang individu dalam masyarakat, bahkan mungkin sampai diteruskan oleh anak keturunannya.

Modal sosial merujuk pada seperangkat norma, jaringan dan organisasi yang melaluinya orang memperoleh akses pada kekuasaan (*power*) dan sumber daya yang merupakan sarana yang memungkinkan pengambilan keputusan dan formulasi kebijakan. Pengertian modal sosial menekankan pada adanya relasi sosial antar- anggota masyarakat yang dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada pada masyarakat tersebut. Hal itu menciptakan kohesi sosial yang amat menentukan bagi kelangsungan perkembangan ekonomi dan pembangunan suatu masyarakat. Modal sosial merupakan potensi besar yang terdapat dalam

masyarakat petani atau masyarakat pedesaan pada umumnya (Coleman dalam Dasgupta, 2000).

Menurut Bardhan (1995), modal sosial dipahami pula sebagai serangkaian norma, jaringan dan organisasi dimana masyarakat mendapat akses pada kekuasaan dan sumberdaya, serta dimana pembuatan keputusan dan kebijakan dilakukan. Fenomena kemiskinan yang membelenggu masyarakat nelayan Indonesia telah banyak diteliti. Berbagai kebijakan dan program reduksi kemiskinan nelayan telah banyak diimplementasikan, khususnya oleh pemerintah, dan juga lembaga-lembaga non pemerintah (*non government organization*). Fakta memperlihatkan bahwa keadaan ekonomi masyarakat nelayan masih merupakan yang terburuk dibandingkan dengan keadaan ekonomi masyarakat yang bekerja di sektor lain (termasuk sektor pertanian sawah).

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan tarap kehidupan ekonomi masyarakat nelayan yang dikenal dengan istilah “revolusi hijau” ternyata belum mampu mencapai hasil yang memuaskan. Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan (Mubyarto, dkk.: 1984; Tarigan: 1991; Ginting: 1996; Sitorus: 1997) menunjukkan bahwa modernisasi penangkapan ikan memang mampu menaikkan produksi nelayan secara kuantitatif, tetapi ternyata tidak mampu meningkatkan kesejahteraan sebagian besar nelayan. Persoalan yang kemudian muncul dibalik persembahan *output* kuantitatif tersebut adalah bahwa secara struktural kualitatif ternyata realitas kemiskinan dalam masyarakat nelayan tetap berada dalam kemiskinannya, bahkan keadaan itu semakin diperburuk lagi dengan semakin

tajamnya kesenjangan sosial ekonomi orang yang memiliki modal dengan nelayan miskin.

Berbicara tentang nelayan, selalu saja terkait dengan kemiskinan. Rasanya sulit untuk menemukan suatu kajian mengenai nelayan yang mengabaikan masalah kemiskinannya. Hanya saja, beberapa kajian yang tidak memfokuskan kepada kemiskinan nelayan, analisis kemiskinan ditempatkan sebagai tema pelengkap. Sementara, kajian mengenai sosial ekonomi masyarakat nelayan menemukan bahwa tema kemiskinan di kalangan nelayan, sering terungkap sebagai salah satu lapisan termiskin dari masyarakat miskin (Mubyarto, dkk 1986; Juwono; 1998, Elfindri, 2002).

Kemiskinan nelayan memang telah diurai oleh pakar untuk menjelaskan penyebab-penyebabnya. Dalam beberapa kajian mengenai kemiskinan nelayan, beberapa peneliti berusaha memberikan penjelasan dengan analisis struktural dengan asumsi bahwa kemiskinan nelayan disebabkan oleh faktor-faktor struktural. Faktor struktural ini bisa berasal dari internal masyarakat seperti hubungan *patron and client* (tuan dan hamba) yang menindas, ketimpangan kepemilikan alat tangkap maupun bersifat eksternal seperti kebijakan pemerintah dan perilaku dari aparaturnya yang merugikan nelayan. Faktor-faktor struktural sebagai penyebab kemiskinan nelayan, selanjutnya sering disebut sebagai kemiskinan struktural. Dalam konteks ini, maka solusi yang ditawarkan adalah meretas persoalan struktural tersebut.

Sementara pakar lainnya, melihat persoalan utama penyebab kemiskinan nelayan adalah masalah mentalitas. Pola hidup yang konsumerisme, boros, tak

biasa menabung, malas, kurang ulet dan ciri lainnya yang dituding sebagai masalah budaya dari nelayan yang menyebabkan kemiskinan nelayan. Mentalitas demikian yang menyebabkan nelayan sulit keluar dari jaring-jaring kemiskinan yang terus menjerat. Fenomena demikianlah yang dikenal juga dengan kemiskinan budaya atau budaya kemiskinan. Solusi cerdasnya sudah pasti menanggulangi persoalan mentalitas nelayan sendiri.

Ada juga pakar yang membuat klasifikasi yang lebih spesifik untuk menjelaskan penyebab kemiskinan tersebut, seperti Nikijuluw (2001) mengklasifikasikannya menjadi: 1) kemiskinan struktural, 2) kemiskinan superstruktural, dan 3) kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena pengaruh faktor atau variabel eksternal di luar individu. Variabel-variabel tersebut adalah struktur sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan insentif atau disinsentif pembangunan, ketersediaan fasilitas pembangunan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumberdaya pembangunan khususnya sumberdaya alam.

Kemiskinan super-struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel kebijakan makro yang tidak begitu kuat berpihak pada pembangunan nelayan. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel yang melekat, inheren, dan menjadi gaya hidup tertentu. Akibatnya sulit bagi yang bersangkutan keluar dari dari kemiskinan itu karena tidak disadari atau tidak diketahui oleh individu yang bersangkutan. Variabel-variabel penyebab kemiskinan kultural adalah tingkat pendidikan, pengetahuan,

adat, budaya, kepercayaan, kesetiaan dan pandangan-pandangan tertentu, serta ketaatan pada panutan.

Polarisasi sosial ekonomi yang semakin tajam ini akan memperkuat kelembagaan tradisional patron-klien. Dalam prakteknya, kelembagaan patron-klien cenderung eksploitatif terhadap nelayan miskin (klien). Hasil penelitian Badaruddin (2001:48-59), menunjukkan bahwa, secara sadar atau terpaksa, kelembagaan patron-klien ini tetap diminati dan dipertahankan oleh komunitas nelayan, dan dijadikan sebagai “katub pengaman” krisis subsistensi yang mereka hadapi.

Koperasi yang diharapkan dapat mengganti fungsi patron, ternyata tidak dapat menjalankan fungsi sebagaimana yang diharapkan. Koperasi (KUD) sebagai kelembagaan sosial ekonomi bercorak “modern” yang ada di desa-desa sebagian besar hanya tinggal nama, tanpa ada kegiatan yang produktif dan efisien. Pengurus koperasi yang seringkali merupakan *drofing* dari pemerintah dan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah ditingkat desa, lebih memperhatikan kepentingan “pemerintah” ketimbang anggotanya sendiri. Di samping itu, kegagalan KUD juga disebabkan oknum-oknum pengurus koperasi yang tidak transparan terhadap keuangan (persoalan moralitas), sehingga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi menjadi hilang.

Kondisi tersebut membuat masyarakat menjadi kecewa terhadap keberadaan koperasi, yang oleh Soetrisno (1995:237) disebut dengan istilah “trauma katalistik koperasi”, yaitu suatu kondisi dalam masyarakat yang mencerminkan keengganan mereka untuk mengembangkan koperasi karena

pernah mengalami suatu kejadian yang antar warga masyarakat, maupun antar warga masyarakat dengan pemerintah, sebagaimana yang dialami oleh masyarakat tersebut di atas merupakan contoh hilangnya potensi modal sosial (*social capital*) dalam kehidupan masyarakat (khususnya masyarakat nelayan).

Angin segar reformasi membuka peluang untuk melakukan perubahan ke arah perbaikan di segala bidang termasuk dalam upaya reduksi kemiskinan masyarakat nelayan melalui perspektif baru dengan memanfaatkan potensi modal sosial yang ada dalam komunitas nelayan. Hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh Badaruddin (2001) terhadap komunitas nelayan di Sumatera Utara (tepatnya di Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang) teridentifikasi adanya potensi modal sosial dalam komunitas tersebut (meskipun sedang mengalami erosi). Modal sosial tersebut diantaranya adalah '*arisan*'. Terbentuknya '*arisan*' dalam komunitas nelayan merupakan salah satu bukti bahwa modal sosial yang berintikan kepercayaan (*trust*), norma-norma, dan jaringan sosial masih ada dalam masyarakat (lihat Geertz, 1962; Putnam, 1993; Fukuyama, 1995; Dasgupta dan Serageldin, 1999). Terbentuknya '*arisan*' sebagai suatu jaringan sosial ekonomi, merupakan asosiasi yang tumbuh dari individu-individu dalam komunitas untuk menghadapi persoalan ekonomi mereka, memerlukan adanya saling percaya diantara sesama anggotanya, melahirkan norma-norma yang disepakati dan dipatuhi bersama. Potensi modal sosial seperti itu (yang sudah mulai tererosi), sudah selayaknya untuk dikembangkan dan dikreasi sedemikian rupa sehingga memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat (khususnya masyarakat nelayan).

Dari hasil kajian yang dilakukan oleh Ostrom (1992), Putnam (1993), Fukuyama (1995), dan Rose (1999), memberikan pemahaman bahwa modal sosial itu berintikan tiga komponen berikut: (1) adanya kemampuan merajut atau membangun pranata dan norma-norma (*crafting institutions*); (2) adanya partisipasi yang setara dan adil (*equal participation*); (3) adanya sikap saling percaya diantara warga suatu kelompok sosial. Ketiga komponen modal sosial itu bukanlah sesuatu yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya melainkan harus dikreasikan dan ditransmisikan melalui mekanisme-mekanisme budaya di dalam sebuah unit sosial, seperti keluarga, komunitas, asosiasi sikarela, negara dan sebagainya.

Dalam mengkaji permasalahan modal sosial dan reduksi kemiskinan pada masyarakat korban gempa dan tsunami di desa nelayan Lhok Pu'uk Kecamatan Seunedon Kabupaten Aceh Utara ini penulis memakai pemahaman bahwa modal sosial yang kemukakan oleh Ostrom (1992), Putnam (1993), Fukuyama (1995), dan Rose (1999). Hal ini disebabkan oleh adanya kemampuan merajut atau membangun pranata dan norma-norma (*crafting institutions*), adanya partisipasi yang setara dan adil (*equal participation*) dan adanya sikap saling percaya diantara warga suatu kelompok sosial, yaitu korban tsunami di desa Lhok Pu'uk.

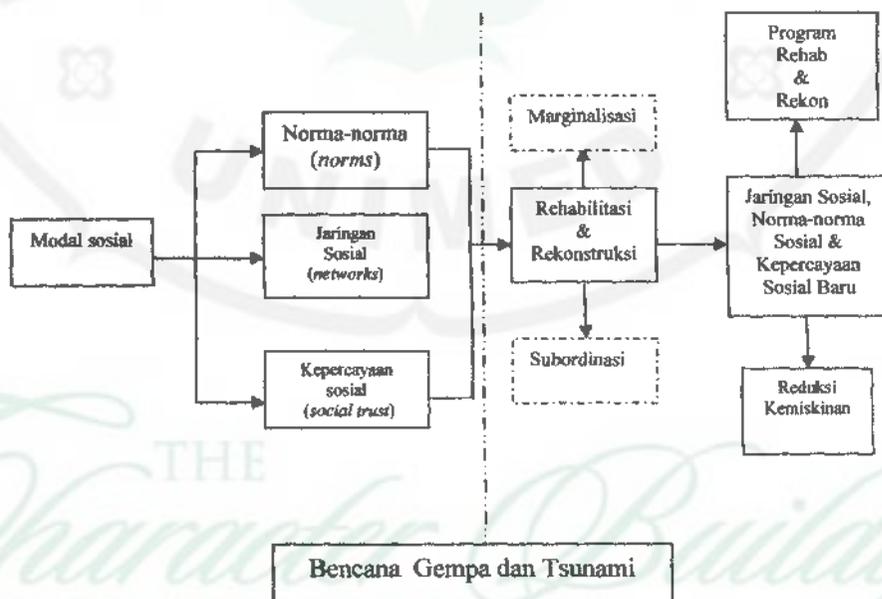
2. Kerangka Berfikir

Modal sosial (*social capital*) memiliki potensi yang besar dalam pembangunan masyarakat. Modal sosial ini berguna terutama untuk menciptakan solidaritas ataupun kebersamaan dan bahkan kesetiakawanan dalam masyarakat

yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan pembangunan. Dalam penelitian ini, modal sosial dimaksud dihubungkan dengan reduksi kemiskinan pada masyarakat di Desa Lhok Pu'uk, sebagai dampak dari gempa bumi dan tsunami tahun 2004 silam.

Kemampuan masyarakat untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama didalam satu komunitas disebut modal sosial yaitu sesuatu yang berdaya guna dan tersedia bagi individu dalam masyarakat melalui relasi-relasi sosial sebagai aspek-aspek dari struktur hubungan-hubungan antar individu yang memungkinkan mereka menciptakan nilai-nilai baru serta dapat digunakan untuk mereduksi kemiskinan pada masyarakat nelayan korban gempa dan tsunami.

Kerangka Dasar Pemikiran Penelitian
MODAL SOSIAL DAN REDUKSI KEMISKINAN
PADA MASYARAKAT KORBAN GEMPA DAN TSUNAMI
 (Kasus di Desa Nelayan Lhok Pu'uk Kecamatan Seunedon
 Kabupaten Aceh Utara)



Dari alur pemikiran diatas dapat ditunjukkan bahwa adanya modal sosial dalam masyarakat akan dapat bekerja dengan baik didalam masyarakat apabila terdapat jaringan-jaringan atau hubungan sosial yang terjadi dengan elegans dalam masyarakat. Jaringan atau hubungan sosial tersebut akan memperkuat posisi masyarakat sehingga akan dapat mendorong terciptanya aktifitas sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk mengatur hubungan sosial sosial tersebut dibutuhkan norma-norma sosial yang dapat menjamin bahwa hubungan sosial tersebut berjalan dengan baik. Selanjutnya, hal utama yang sangat dibutuhkan dalam modal sosial tersebut adalah adanya sikap saling percaya dalam masyarakat yang cukup berkontribusi dalam menciptakan interaksi yang elegans.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan gejala dan gejala yang lain dalam masyarakat (Tan, 180). Sesuai dengan sifat penelitian yang deskriptif, maka data yang di kumpulkan adalah data kualitatif. Walaupun demikian, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan data kuantitatif. Melly G Tan (1981), menyebutkan bahwa penelitian deskriptif dapat juga menggunakan data kuantitatif. Data yang dicari adalah informasi tentang kata-kata dan tindakan (Moleong, 1991) dari masyarakat yang berhubungan dengan penggunaan modal sosial pada masyarakat korban gempa dan tsunami dalam upaya mereduksi kemiskinan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini direncanakan akan dikumpulkan dengan teknik wawancara dan pengamatan (observasi). Wawancara yang dilakukan bersifat bebas mendalam (*depth interview*) dan wawancara biasa. Wawancara ini dilakukan pada beberapa informan, baik yang dipilih sebelumnya maupun tidak. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*). Wawancara dilakukan terhadap tiga kelompok informan yang ada dalam kajian ini, yaitu: i) Informan pangkal, ii) Informan kunci (*key informants*), dan iii) informan biasa.

Informan pangkal adalah kepala desa, kepala dusun, Imam Meunasah. Dari kepala desa dan perangkatnya ini diharapkan akan diperoleh keterangan tentang orang-orang yang dapat dihubungi dan dijadikan sebagai informan kunci. Informan kunci adalah penduduk desa yang memiliki pengetahuan yang luas terhadap permasalahan yang diteliti yang utamanya adalah tokoh masyarakat yang ada di Desa Desa Lhok Pu'uk. Para *agent of change* yang bisa merupakan sukarelawan LSM atau badan-badan pemerintah juga dikelompokkan pada informan jenis ini. Dari para informan ini diharapkan akan diperoleh data mengenai strategi yang dilakukan dalam kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi. Sedangkan informan biasa adalah para penduduk desa biasa. Dari kelompok informan biasa diharapkan akan diperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan bentuk-bentuk program rekonstruksi yang telah berjalan dan bagaimana mereka melihat pemanfaatan modal sosial dalam mereduksi kemiskinan yang terkait dengan hal-hal yang umum. Guna untuk menghindari kehilangan data

dalam proses pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara akan dipergunakan *tape recorder* dan atau catatan lapangan.

Selain wawancara, teknik pengamatan juga dilakukan. Teknik pengamatan dilakukan untuk memahami fenomena-fenomena yang ada di desa penelitian. Dengan pengamatan ini diharapkan akan diperoleh data pendukung yang berkaitan dengan identifikasi terhadap bentuk-bentuk program rekonstruksi yang terdapat adanya pemakaian modal sosial. Untuk mendukung keabsahan data dari pengamatan ini direncanakan akan digunakan instrumen kamera foto. Dalam penelitian ini juga menggunakan FGD (*Focus Group Discussion*) yang berguna untuk mendapatkan informasi yang valid dan sekaligus menverifikasi data yang didapatkan dari observasi dan wawancara.

3. Teknik Analisa Data

Data-data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan pengamatan akan dianalisa berdasarkan tema tertentu secara kualitatif. Dengan model analisa seperti ini, konsep-konsep serta teori yang dipakai dalam proposal penelitian dapat saja berbeda dengan keadaan di lapangan. Setiap informasi baru yang diperoleh dihadapkan dan dirujuk kepada informasi yang sudah terkumpul dan hasilnya digunakan untuk membangun pertanyaan baru pada hari berikutnya.

Sejalan dengan penggunaan teknik yang demikian, maka dapat dikatakan bahwa data atau informasi yang diperoleh dari lapangan proses penganalisaannya dilakukan di lapangan berbarengan dengan tahapan pengumpulan data dan bukan dianalisa setelah pengumpulan data di lapangan selesai. Jadi dengan kata lain,

analisa dilakukan sambil meneliti atau selama proses pengumpulan data berlangsung. Model penganalisaan seperti ini lebih dikenal dengan “*On-going Analysis*”. Walaupun demikian, semua data yang diperoleh akan diklasifikasikan berdasarkan tema, sumber perolehan dan tujuannya. Dengan demikian data-data yang ada akan dimanfaatkan untuk menjelaskan permasalahan penelitian. Intinya semua data akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada.

4. Lokasi dan Waktu Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Desa Lhok Pu'uk Kecamatan Seunedoan Kabupaten Aceh Utara. Propinsi Nangroe Aceh Darussalam. Adapun alasan mengapa desa ini yang dijadikan sebagai lokasi dikarena beberapa pertimbangan diantaranya :

1. Desa ini merupakan salah satu desa yang paling banyak korban jiwa dan paling parah kerusakan secara fisik di Kabuapten Aceh Utara ketika dilanda gempa dan sapuan gelombang tsunami tanggal 26 Desember 2004.
2. Sebelum gempa dan tsunami desa ini merupakan desa nelayan dengan kehiduapannya berada dalam kemiskinan.
3. Di desa ini terdapat bantuan kemanusiaan dalam rangka rekontruksi dan rehabilitasi baik yang bersumber dari pemerintah maupun lembaga-lembaga bantuan seperti LSM dalam dan luar negeri.

5. Waktu penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilakukan selama 3 bulan yaitu dari bulan April hingga Juni 2010.

Tabel.1. Jadwal Rencana Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan/Minggu Ke :									
		I			II				III		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Penyusunan Desain Penelitian	■									
2.	Penjajagan Lokasi Penelitian	■	■								
3.	Mengurus Ijin Penelitian		■								
4.	Melakukan Wawancara, Observasi		■	■	■	■	■	■			
5.	Adhoc Survey		■				■				
6.	Analisis Keschuruhan Data		■	■	■	■	■	■	■		
7.	Penulisan Laporan							■	■	■	
9.	Seminar hasil dan Revisi Laporan								■	■	■
10	Pencetakan dan Penyerahan Laporan										■